

ASPIRASI *kita*

*Anggota Fraksi PKS
DPRD Jawa Timur*



SOLID KAWAL LEBARAN 2025

Masyarakat Harus Nyaman Di Hari Besar

EDISI 3 MARET 2025



www.fraksipksjatim.id



fraksipksjatim



KOMUNITAS PISTON TEMUI FRAKSI PKS JATIM, BAHAS KESEJAHTERAAN DRIVER OJEK ONLINE

Komunitas Perhimpunan
Inovatif Solidaritas
Transportasi Online
Nusantara (PISTON)
melakukan kunjungan ke
Ruang Fraksi PKS DPRD
Jawa Timur untuk
berdiskusi mengenai
kesejahteraan para
pengemudi ojek online.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menerima langsung perwakilan komunitas tersebut dan mendengarkan aspirasi mereka terkait berbagai tantangan yang dihadapi di lapangan.

Menurut Lilik, para pengemudi ojek online mengeluhkan berbagai kendala, terutama dalam relasi dengan perusahaan yang menaungi mereka. Posisi mereka yang lemah dalam sistem kemitraan membuat kesejahteraan mereka sering kali terabaikan. "Komunitas ini datang untuk berdiskusi bagaimana menjaga kesejahteraan driver ojek online di tengah banyaknya tantangan, termasuk terkait dengan posisi mereka yang lemah dalam hubungan dengan perusahaan aplikator," ujar Lilik, Kamis (27/2/2025).

Dalam pertemuan tersebut, komunitas PISTON juga mengajukan permohonan agar Ketua Fraksi PKS Jatim bisa menjadi pembina mereka, sehingga komunitas memiliki dukungan dalam mengakses program-program dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Mereka menyampaikan keinginan agar saya menjadi pembina PISTON, sehingga mereka punya cantolan untuk mendapatkan program-program dari Pemprov Jatim. Selain itu, mereka juga ingin terus mengembangkan komunitas ini agar bisa menjangkau seluruh Indonesia,” jelas legislator PKS itu.

Ia mengapresiasi semangat komunitas PISTON dalam memperjuangkan kesejahteraan anggotanya, serta kontribusi mereka dalam kegiatan sosial. Namun, ia menegaskan bahwa dukungan tidak bisa diberikan secara instan, melainkan melalui proses kerja sama dan penguatan komunitas.

“Saya tidak langsung menerima apa yang mereka inginkan, tetapi saya mendukung mereka untuk terus bergerak dan bekerja sama dengan komunitas pengemudi daring lainnya. Harapannya, mereka bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai pengemudi, sekaligus menjalankan kewajiban mereka secara profesional,” katanya.

Lilik berharap diskusi ini menjadi langkah awal dalam memperjuangkan kesejahteraan para driver ojek online di Surabaya dan Jawa Timur secara umum. Ia juga mendorong komunitas PISTON untuk terus bersinergi dengan berbagai pihak agar perjuangan mereka bisa membuahkan hasil yang nyata.

DUKUNG OLAHRAGA DI JAWA TIMUR, KETUA FRAKSI PKS DPRD JATIM SAMBUT ASPIRASI ORKI

Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, menerima kunjungan pengurus Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (Orki) pada Senin, (17/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, Orki menyampaikan aspirasi terkait kemudahan registrasi sebagai organisasi keolahragaan resmi di Jawa Timur.



“Kami kedatangan teman-teman dari Organisasi Olahraga Kebugaran Indonesia (Orki), sebuah perkumpulan penggemar berbagai macam olahraga yang ada di Jawa Timur,” ujar Lilik. Menurutnya, Orki saat ini telah berkembang pesat di delapan daerah di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Kab. Malang, Tulungagung, Kab. Kediri, Bondowoso, dan Jember. Organisasi ini berperan dalam mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat.

“Tadi mereka meminta kemudahan agar bisa teregistrasi sebagai organisasi keolahragaan resmi di Jawa Timur. Selain itu, mereka juga berbagi cerita tentang perkembangan Orki yang semakin meluas,” tambah anggota Komisi C DPRD Jatim itu.

Lilik menyambut baik semangat yang ditunjukkan oleh Orki dan menilai kehadiran mereka bisa membawa dampak positif bagi kesehatan masyarakat.

“Mudah-mudahan semangat anak-anak muda dalam membawa olahraga ke dalam aktivitas keseharian bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan masyarakat, khususnya di Jawa Timur,” tutupnya.

Dengan semakin berkembangnya Orki, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan lebih lanjut, baik dalam bentuk kebijakan maupun fasilitas, agar organisasi ini dapat semakin berkontribusi dalam membangun budaya hidup sehat di Jawa Timur.

Ketua Orki Jawa Timur, Akhdiyati Syabril Ulum, menyampaikan bahwa, ke depan, akan terus dikembangkan ke daerah-daerah lainnya dan melengkapi kepengurusannya hingga semua Kota/Kabupaten se-Jatim.

“Visi kami terbentuk 135 titik chapter baru dari trainer-trainer kebugaran, senam, runners, panahan, cyclist, yang di naungi oleh Orki di 38 Kota Kab. Di Jatim. Mohon doanya,” kata Ulum.



**BERI PARCEL
LEBARAN UNTUK
OB DAN PAMDAL,
FRAKSI PKS:
APRESIASI UNTUK
PAHLAWAN DI
BALIK LAYAR
DPRD JATIM**

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1446H, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur kembali menunjukkan kepeduliannya dengan membagikan parcel lebaran kepada Office Boy (OB) dan petugas pengamanan dalam (Pamdal) di lingkungan DPRD Jatim. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi terhadap peran mereka yang kerap bekerja di balik layar untuk memastikan kebersihan, keamanan, dan kenyamanan kantor DPRD Jatim.

Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim, Lilik Hendarwati, menyampaikan bahwa inisiatif ini adalah bagian dari semangat berbagi di bulan suci Ramadan sekaligus ungkapan terima kasih atas dedikasi mereka. "Alhamdulillah, di akhir Ramadan yang penuh berkah ini, Fraksi PKS DPRD Jawa Timur kembali berbagi kebahagiaan dengan saudara-saudara kita, khususnya para Office Boy (OB) dan Pamdal yang telah bekerja keras menjaga kebersihan, keamanan, dan kenyamanan di lingkungan DPRD Jatim. Kegiatan berbagi parcel ini adalah bentuk apresiasi kami atas dedikasi mereka yang sering kali bekerja di balik layar namun memiliki peran yang sangat penting," ujar Lilik.

Lebih lanjut, ia berharap parcel yang diberikan dapat membawa kebahagiaan bagi para penerima dan keluarga mereka dalam menyambut Idul fitri. "Semoga semangat berbagi dan kepedulian ini terus menguat di tengah kita, dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan bagi kita semua. Fraksi PKS akan terus berupaya hadir dengan kepedulian nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar," tambahnya.

Para penerima parcel menyambut kegiatan ini dengan antusias dan mengungkapkan rasa syukur atas perhatian yang diberikan oleh Fraksi PKS. Mereka merasa dihargai atas kerja keras yang selama ini dilakukan. Kegiatan berbagi parcel ini menjadi bagian dari komitmen Fraksi PKS DPRD Jatim dalam menghadirkan kepedulian sosial dan semangat kebersamaan, khususnya dalam momen istimewa menjelang Hari Raya Idul fitri.

Ketua Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HJ. LILIK HENDARWATI

KOMISI C
(KEUANGAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)
BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)



Anggota DPRD Jawa Timur dari daerah pemilihan Surabaya, Lilik Hendarwati, menyesalkan minimnya sosialisasi berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Padahal, menurutnya, sektor UMKM menjadi tulang punggung perekonomian di Jawa Timur.

“Jika kita bicara terkait UMKM, PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Timur ini lebih dari 56 persen ditopang oleh UMKM. Artinya, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi di Jawa Timur,” ujar Ketua Fraksi PKS Jatim itu. Lilik mengungkapkan bahwa saat ini banyak keluhan dari para pelaku UMKM mengenai daya beli masyarakat yang semakin menurun, yang berimbas pada ketahanan ekonomi keluarga mereka.

ANGGOTA DPRD JATIM LILIK HENDARWATI SESALKAN MINIMNYA SOSIALISASI PROGRAM PEMERINTAH UNTUK UMKM

Ia menilai pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program untuk membantu UMKM, seperti Program Kredit Sejahtera (Prokesra), Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari BPR Jatim dan Bank Jatim dengan bunga rendah 3 persen, serta berbagai pelatihan dari Dinas Koperasi. Selain itu, program sertifikasi tanah dari pemerintah pusat juga dapat membantu UMKM dalam mendapatkan akses permodalan.

Namun, Lilik menilai program-program tersebut kurang tersosialisasikan dengan baik. Ia menyampaikan, banyak pelaku UMKM yang masih belum tahu bagaimana cara mengakses program-program ini. Sosialisasinya ke masyarakat masih kurang. "Yang sering saya sesalkan adalah kurangnya sosialisasi yang tidak cukup tersampaikan ke teman-teman UMKM," tegasnya. Menurutnya, sosialisasi harusnya bisa disampaikan masif melalui pemerintahan terdekat, seperti kecamatan, kelurahan RT, RW. Dengan begitu, informasi akan lebih cepat tersebar. Selain permodalan, tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan agunan yang membuat mereka kesulitan mengakses kredit. Lilik mendorong agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan kredit tanpa agunan bagi UMKM yang membutuhkan modal kecil. Tantangan lain yang juga menjadi perhatian adalah pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha. "SDM kita, khususnya yang sudah berusia, memiliki keterbatasan dalam hal teknologi digital. Padahal, jika mereka mampu menguasai ini, potensi berkembangnya sangat besar," jelasnya. Lilik juga menyoroti potensi produk-produk UMKM Jatim yang diminati pasar internasional, seperti sarang burung walet dan bahan baku minyak wangi yang dibutuhkan Australia, serta abon ikan yang diminati di Amerika dan Jepang.

Namun, menurutnya, dukungan pemerintah dalam pemasaran masih kurang optimal. "Peran Disperindag sangat penting untuk membantu produk UMKM bisa lebih dikenal, misalnya dengan mendatangkan buyer atau mengadakan pameran agar produk-produk kita bisa menembus pasar global," ujarnya. Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, Lilik menilai pemerintah harus lebih proaktif. "Saya mendorong pemerintah untuk jemput bola, mendatangi masyarakat dan pelaku UMKM," katanya. Ia menekankan bahwa UMKM juga membutuhkan pendampingan, bukan sekadar pendanaan dan pelatihan. "Pemerintah perlu memberikan coaching dalam usaha mereka, agar bisa lebih maksimal dalam memanfaatkan teknologi dan mengelola keuangan," jelasnya. Lilik juga mendorong pelaku UMKM untuk bergabung dalam komunitas agar lebih mudah mendapatkan informasi dan berkembang lebih cepat. "Dari pengalaman saya, UMKM yang masuk dalam komunitas lebih cepat berkembang. Mereka bisa saling berbagi ilmu dan dukungan," pungkasnya. Dengan perputaran ekonomi Jatim yang hampir separuhnya ditopang UMKM, Lilik menegaskan bahwa dukungan pemerintah harus lebih besar dan regulasi yang dibuat DPRD Jatim harus benar-benar berpihak pada UMKM. "Kolaborasi semua pihak sangat dibutuhkan untuk memajukan UMKM," tutupnya.

LILIK DPRD JATIM DESAK PT PWU TRANSPARAN SOAL KEUANGAN JATIM EXPO



Anggota Komisi C DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, mendesak PT Panca Wira Usaha (PWU) untuk lebih transparan dalam pengelolaan keuangan Jatim Expo. Ia mempertanyakan setoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai terlalu kecil dibandingkan dengan potensi bisnis yang dimiliki.

“Jatim Expo pada Desember kemarin hanya menyetorkan PAD sebesar Rp 100 juta dalam setahun. Saya minta agar angka ini dinaikkan,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD Jatim itu. Selain meminta kenaikan setoran PAD, Lilik juga menyoroti ketidakjelasan laporan keuangan Jatim Expo. Ia ingin mengetahui secara pasti berapa sebenarnya pendapatan gedung pertemuan tersebut.

"Saya ingin tahu berapa sebenarnya pendapatan Jatim Expo selama ini. Tapi alasannya karena bangunan itu belum lunas, sehingga mereka masih harus membayar utang pembangunan," jelasnya. Lilik menilai alasan tersebut tidak cukup kuat, mengingat Jatim Expo secara bisnis terlihat ramai. Ia pun membandingkan pendapatan yang disetorkan dengan usaha kecil seperti warung kopi. "Hanya Rp 100 juta per tahun, kalau dibagi dalam sebulan tidak sampai Rp 9 juta. Masak pendapatannya sama dengan warkop?" tegasnya.

Lilik menegaskan bahwa kritikan terhadap transparansi keuangan BUMD, termasuk PT PWU, bukan tanpa alasan. Menurut Lilik, Komisi C DPRD Jatim berupaya memastikan bahwa seluruh BUMD benar-benar bisa memberikan dividen sesuai dengan tugasnya sebagai sumber utama PAD, sebagaimana diatur dalam PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat sejak diberlakukannya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), PAD Jawa Timur mengalami penurunan drastis hingga Rp 4 triliun, Komisi C terus berupaya mencari solusi untuk meningkatkan PAD dari sumber lain.



Salah satu yang menjadi prioritas adalah BUMD, yang seharusnya menjadi core business bagi Pemprov Jawa Timur. "Karena PAD kita berkurang hingga Rp 4 triliun sejak UU HKPD diberlakukan, kami di Komisi C harus memastikan bahwa BUMD bisa memberikan kontribusi yang optimal. Jangan sampai potensi pendapatan besar, tetapi kontribusi ke PAD masih kecil," tegas Lilik. Oleh karena itu, ia meminta PT PWU untuk membuka laporan keuangan Jatim Expo secara transparan agar bisa dievaluasi secara objektif. "Kami butuh laporan yang jelas agar bisa mengukur seberapa besar potensi sebenarnya. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi," pungkasnya

Sekretaris Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

DRH.H. PUGUH WIJI PAMUNGKAS, MM

KOMISI E

(KESRA)

BADAN KEHORMATAN (BK)





**PUGUH WIJI
PAMUNGKAS
TERIMA
KUNJUNGAN
PEMUDA
MUHAMMADIYAH,
SIAP KOLABORASI
UNTUK KOTA
MALANG**

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan jumlah pemudik Lebaran 2025 turun hingga 24 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini berkaitan erat dengan keterbatasan dana masyarakat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan isu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub bersama akademisi memproyeksikan jumlah pemudik tahun ini mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52 persen dari penduduk Indonesia. Angka tersebut turun drastis dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193,6 juta pemudik.

Jika 46,5 juta orang batal mudik dan rata-rata pemudik mengeluarkan Rp2 juta hingga Rp5 juta selama perjalanan, maka potensi kontraksi peredaran uang bisa mencapai Rp93 triliun hingga Rp232 triliun. Dampak ini tidak hanya dirasakan secara langsung, tetapi juga berpengaruh terhadap efek multiplier dari belanja Lebaran, seperti pendapatan pekerja logistik dan permintaan bahan baku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menanggapi kondisi ini, Anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyatakan bahwa situasi ini akan berdampak besar pada sektor informal, termasuk pedagang kaki lima di terminal dan pasar tradisional di daerah tujuan mudik. "Menurunnya angka pemudik pada Lebaran tahun ini tentu menjadi kabar buruk bagi gairah ekonomi lokal, pegiat UMKM, pariwisata, dan sektor lainnya yang menggantungkan harapan pada momentum mudik. Bisa dipastikan pergerakan ekonomi di daerah tujuan mudik akan berkurang," ujar Sekretaris Fraksi PKS Jatim itu.

Ia menekankan bahwa Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan banyak daerah tujuan mudik, akan merasakan dampak penurunan jumlah pemudik ini. "Terlebih, Jawa Timur yang kabupaten/kotanya menjadi tujuan utama pemudik tentu akan menghadapi ancaman terhadap gairah ekonomi lokal selama libur Lebaran," tambahnya.

Puguh juga mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pemerintah kabupaten/kota untuk mengambil langkah strategis guna menyikapi kondisi ini. Menurutnya, rekayasa kebijakan dan inovasi regulasi sangat diperlukan agar dampak ekonomi dari Lebaran tetap terjaga meskipun jumlah pemudik berkurang. "Sangat bagus jika Pemprov dan Pemkab melakukan manuver inovatif untuk memastikan momen Lebaran tetap memberikan dampak positif bagi ekonomi lokal, meskipun jumlah pemudik menurun," tegas legislator PKS itu.



**PORPROV JATIM IX
DIGELAR DI MALANG
RAYA, PUGUH: INI
AJANG PRESTASI DAN
KEBANGKITAN
EKONOMI!**

Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur IX yang akan digelar pada Juni mendatang di Malang Raya menjadi sorotan banyak pihak. Selain sebagai ajang pencarian atlet berbakat, event ini juga diharapkan mampu mendorong kebangkitan ekonomi lokal. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menegaskan pentingnya penyelenggaraan Porprov yang berkualitas dan memiliki dampak luas bagi masyarakat.

“Ajang Porprov ini sejatinya adalah sarana penjurangan atlet berbakat di Jawa Timur yang nantinya akan masuk dalam pelatda untuk persiapan menuju PON. Oleh karena itu, penting memastikan Porprov ini berjalan dengan berkualitas dan penuh sportivitas,” ujar Puguh dalam wawancara di Gedung Indrapura, Rabu (19/3/2025).

Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim itu juga menekankan pentingnya integrasi data atlet antara KONI Jawa Timur dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Jawa Timur. Dengan sistem data tunggal, talents mapping dan career progress bisa diterapkan untuk memastikan pembinaan atlet lebih optimal. "Saat ini terkesan semua berjalan sendiri-sendiri, baik Dispora, KONI, maupun penyelenggara event olahraga mandiri. Akibatnya, banyak atlet berbakat yang tidak diakui karena tidak terkoneksi dengan event-event resmi Dispora atau KONI," ungkap pria kelahiran Malang ini.

Porprov Jatim IX akan melibatkan sekitar 19.000 orang, termasuk atlet, pelatih, ofisial, dan keluarga. Event ini akan dibuka di Stadion Gajayana, Kota Malang, dan ditutup di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang. Sebanyak 62 cabang olahraga akan dipertandingkan, dengan 37 disiplin cabor di Kota Malang, 32 di Kabupaten Malang, dan 15 di Kota Batu.

Selain sebagai ajang pembinaan atlet, Puguh berharap Porprov juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama bagi pelaku UMKM. "Saya berharap Porprov ini tidak hanya sekadar mencari atlet berbakat di Jawa Timur, tetapi juga menjadi sarana untuk menggerakkan perekonomian di kalangan bawah," tegasnya.

Ia mendorong KONI sebagai penyelenggara untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah di Malang Raya dan organisasi UMKM. Dengan puluhan miliar dana APBD yang dialokasikan untuk event ini, Puguh menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran yang efektif agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.

"Puluhan miliar dana APBD yang digelontorkan untuk event ini harus bisa berdampak bagi kebangkitan ekonomi daerah," pungkas legislator PKS ini. Dengan berbagai harapan besar ini, Porprov Jatim IX di Malang Raya diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun prestasi atlet dan mendorong roda perekonomian lokal.

Bendahara Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

HARISANDI SAVARI, S.PT, ST

KOMISI D

(PEMBANGUNAN)

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)





**MADURA GELAP DAN JALAN
RUSAK, HARISANDI DPRD
JATIM: JANGAN TUNGGU
LEBIH BANYAK
KECELAKAAN!**

Kondisi infrastruktur di Madura kembali menjadi sorotan, terutama menjelang arus mudik Lebaran. Minimnya penerangan jalan umum (PJU) dan buruknya kondisi jalan nasional di wilayah ini menjadi keluhan utama masyarakat. Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Madura, Harisandi Savari, yang juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim, menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama karena berisiko meningkatkan angka kecelakaan.

“Tentu saya prihatin soal banyaknya keluhan tentang minimnya penerangan jalan umum di sepanjang akses jalan utama Madura. Keluhan ini tidak hanya datang dari saya pribadi, tetapi juga dari banyak pengendara yang melintas dari Suramadu sisi Madura hingga ke ujung timur Madura, yakni Sumenep. Pemerintah harus perhatian, jangan menunggu banyak kecelakaan,” ujar Harisandi.

Legislator PKS itu menggambarkan kondisi PJU di Madura yang sangat minim, terutama setelah keluar dari arah Suramadu. Harisandi menyoroti bahwa ruas jalan dari Suramadu hingga pertigaan Tangkel tampak gelap gulita dan sangat membahayakan para pengguna jalan. Selain penerangan yang minim, buruknya infrastruktur jalan juga menjadi masalah utama.

Menurutnya, jalan nasional di Madura yang benar-benar layak dan lebar hanya terdapat di beberapa titik, sementara sebagian besar masih dalam kondisi yang jauh dari ideal. "Bagi saya, ini tentu tidak bisa dibiarkan terlalu lama. Apalagi sebentar lagi akan menghadapi arus mudik. Jalan tidak boleh dibiarkan gelap gulita karena ini sangat mempengaruhi angka kecelakaan," tegasnya.

Harisandi pun meminta Dinas Perhubungan untuk segera turun tangan tanpa harus menunggu banyaknya keluhan dari masyarakat. Ia berharap ada langkah konkret yang segera diambil agar infrastruktur di Madura bisa lebih aman dan nyaman bagi pengguna jalan, terutama saat momen mudik Lebaran nanti.

"Saya rasa Dinas Perhubungan harus lebih banyak turun ke bawah untuk melihat secara langsung kondisi yang ada, jadi tidak harus menunggu banyak keluhan baru ada penanganan," pungkasnya. Dengan kondisi ini, masyarakat Madura berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk segera memperbaiki PJU dan jalan nasional yang rusak. Jangan sampai infrastruktur yang buruk justru membahayakan para pemudik yang akan pulang ke kampung halaman.

Wacana dari sebagian warga Surabaya yang ingin merobohkan Jembatan Suramadu akibat maraknya aksi kriminal di jalur penghubung Surabaya-Madura ini mendapat tanggapan tegas dari Anggota Komisi D DPRD Jatim, Harisandi Savari.

Menurutnya, gagasan tersebut tidak masuk akal dan bukan solusi yang tepat.

“Kami paham, banyak yang kesal karena sering terjadi kejadian tak diinginkan di Suramadu. Tapi solusinya bukan dengan merobohkan jembatan. Itu ngawur!” tegas Harisandi.

Politisi asal Madura ini menegaskan, keresahan akibat aksi kriminal di Suramadu bukan hanya dirasakan oleh warga Surabaya, tetapi juga oleh masyarakat Madura secara umum.

Ia menyebut, pihaknya telah berulang kali meminta pemerintah dan aparat terkait untuk menindak tegas para pelaku kejahatan di jembatan tersebut.



**SURAMADU
DIROBOHKAN?
HARISANDI: ITU
NGAWUR!**

“Kami sudah sering mengingatkan soal indikasi pembegalan dengan senar pancing atau nilon, serta pencurian kendaraan di Suramadu. Kasus terakhir yang menimpa pengendara harus menjadi peringatan serius,” ujar anggota DPRD Jatim dari dapil Madura itu. Meski demikian, Harisandi menekankan bahwa tindak kriminal ini dilakukan oleh segelintir orang yang memang berniat jahat, bukan cerminan dari masyarakat Madura secara keseluruhan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pusat yang saat ini memiliki kewenangan penuh atas Jembatan Suramadu untuk segera meningkatkan keamanan dengan langkah konkret. “Solusi yang dibutuhkan adalah peningkatan keamanan, bukan merobohkan jembatan. Pemerintah pusat harus segera bertindak, misalnya dengan menambah pos keamanan, memasang CCTV di titik rawan, dan meningkatkan patroli di sepanjang jembatan,” tegasnya.

Harisandi mengingatkan bahwa keberadaan Suramadu bertujuan untuk pemerataan infrastruktur dan perekonomian antara Surabaya dan Madura. Ia berharap, pemerintah segera meredam kekhawatiran masyarakat dengan menghadirkan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga keamanan pengendara. “Suramadu ini aset penting bagi Jawa Timur. Tinggal bagaimana pemerintah pusat bisa menekan kekhawatiran pengendara, bukan malah menghilangkan jembatannya,” pungkasnya.

Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

H AGUS GAHYONO, SHI, MHI

KOMISI A
(PEMERINTAHAN)

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH (BAPEMPERDA)





**AGUS
CAHYONO:
PINJOL DAN
JUDOL MAKIN
LIAR, DPRD
JATIM SIAPKAN
RAPERDA
KHUSUS**

Maraknya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal dan judi online (judol) di Indonesia, termasuk di Jawa Timur, kian meresahkan. Menyikapi kondisi ini, DPRD Jawa Timur tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) khusus untuk mencegah dampak negatif dari praktik ilegal tersebut. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Agus Cahyono, menyampaikan keprihatinannya terhadap fenomena ini.

Berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Maret 2025, terdapat 4 juta warga Indonesia yang terlibat judi online, di mana 520 ribu di antaranya berusia 10 hingga 20 tahun. Tak hanya itu, sepanjang 2024 tercatat lebih dari 209 ribu transaksi judi online dengan nilai mencapai Rp 359,8 triliun.

“Jawa Timur sendiri menempati posisi keempat dalam jumlah pelaku judi online di Indonesia, dengan 135.227 pemain dan total transaksi mencapai Rp 1,015 triliun. Ini angka yang luar biasa besar dan dampaknya sangat serius,” ujar Agus Cahyono, Kamis (20/3). Tak hanya judi online, jeratan pinjol ilegal juga membawa dampak sosial yang mengerikan. Agus menyoroti fakta bahwa sejak 2019 hingga Desember 2023, ada 51 kasus bunuh diri di Indonesia akibat pinjol ilegal.

Legislator PKS itu menyampaikan, DPRD Jatim, melalui Komisi A, menginisiasi Raperda Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judi Online sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat, khususnya aparat pemerintah provinsi. Namun, proses pembahasannya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. “Raperda ini memang inisiatif dari Komisi A. Namun, progresnya masih menunggu peraturan menteri. Saat ini, Menteri Komunikasi dan Digital sedang berkoordinasi dengan Menkopolkam untuk menerbitkan peraturan terkait judi online dan pinjol ilegal,” jelas Agus.

Menurutnya, tanpa regulasi yang jelas dari pemerintah pusat, ada risiko Raperda ini bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. “Jika kita lanjut tanpa menunggu peraturan menteri, dikhawatirkan akan ada ketidaksinkronan regulasi. Maka untuk ketertiban hukum, kita tunggu dulu peraturan tersebut sebagai pijakan pembahasan Raperda,” tegasnya. Agus juga menegaskan bahwa Raperda ini akan difokuskan pada aparat pemerintah provinsi Jawa Timur, bukan pada perjudian secara umum.

“Kewenangan Pemprov Jatim hanya mencakup ASN dan aparat di bawah naungan Pemprov. Untuk pemberantasan perjudian secara luas, itu menjadi kewenangan pemerintah pusat lewat lembaga penegak hukum,” ujarnya. DPRD Jatim berharap pemerintah segera menerbitkan regulasi terkait agar penyusunan Raperda ini bisa segera dipercepat. “Pinjol dan judol makin liar, dan jika kita tidak bergerak cepat, dampaknya bisa semakin besar bagi masyarakat,” tutup Agus.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, Agus Cahyono, menyesalkan keputusan pemerintah terkait penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam perencanaan dan pengelolaan rekrutmen aparatur negara.

“Penundaan ini sangat disayangkan karena sejak awal sudah ada perencanaan yang matang, mulai dari kebutuhan CPNS dan PPPK hingga penempatan formasi di berbagai daerah. Jika sekarang ditunda dengan alasan penyelerasan data, ini justru menunjukkan bahwa pemerintah kurang profesional dalam menjalankan kebijakan ini,” ujar Agus Cahyono.

**WAKIL KETUA
KOMISI A
DPRD JATIM,
AGUS
CAHYONO
SESALKAN
PENUNDAAN
PENGANGKAT
AN CPNS DAN
PPPK**



Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa data terkait kebutuhan dan penempatan CPNS maupun PPPK telah disusun sejak tahap awal seleksi. Sehingga, menurutnya, tidak ada alasan yang cukup kuat bagi pemerintah untuk menunda proses pengangkatan tersebut.

“Anggaran untuk belanja pegawai CPNS dan PPPK sudah dialokasikan, sehingga tidak ada efisiensi yang bisa dijadikan alasan untuk menunda pengangkatan mereka. Pemerintah seharusnya lebih konsisten dalam menjalankan kebijakan yang telah direncanakan sejak awal,” tambah anggota Fraksi PKS di DPRD Jatim itu.

Agus berharap pemerintah segera memberikan kepastian terkait pengangkatan CPNS dan PPPK agar tidak merugikan para calon pegawai yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi. Ia juga meminta agar pemerintah lebih transparan dalam menjelaskan alasan di balik keputusan ini agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

Anggota Fraksi PKS
DPRD Provinsi
Jawa Timur

DRS. H. M KHUSNUL KHULUK

KOMISI B

(PEREKONOMIAN)

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)



Penemuan ladang ganja seluas puluhan hektare di kawasan Gunung Bromo-Semeru ramai diperbincangkan. Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Lumajang-Jember, Khusnul Khuluk, mempertanyakan mengapa pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) baru mengklarifikasi kasus ini sekarang, padahal kejadian ini terjadi pada 18-21 September 2024 lalu itu.

Selasa (18/3) lalu TNBTS memang mengunggah video klarifikasi melalui akun Instagramnya. Mereka menjelaskan berbagai hal terkait dengan penemuan tanama ganja, pelarangan penggunaan drone hingga dan juga kewajiban menggunakan pemandu, dan seterusnya.

LADANG GANJA DI GUNUNG BROMO-SEMERU TERUNGKAP, KHUSNUL KHULUK: ADA APA DENGAN TNBTS?



“Kenapa baru sekarang ada klarifikasi? Kejadian ini sudah lama, hampir setengah tahun berlalu sejak ditemukan oleh Polres dan TNI Lumajang. Ada sekitar 48.000 tanaman ganja yang ditemukan di Dusun Pusung Duwur, tapi selama itu tidak terpantau oleh pihak TNBTS?” ujar Khusnul.

Legislator PKS itu membandingkan pengawasan TNBTS yang sangat ketat terhadap pencurian kayu dengan pengawasan terhadap lahan ganja yang luas. “Kalau ada orang nyuri satu batang kayu saja, cepat ketahuan. Tapi kenapa ladang ganja sebesar itu bisa lolos?” tambahnya. Selain itu, ia juga menyoroti aturan ketat di kawasan tersebut, seperti larangan penggunaan drone kecuali dengan biaya sewa Rp2 juta, yang dinilai memberatkan wisatawan. Kebijakan wajib menggunakan guide untuk pendakian ke Mahameru juga dipertanyakan.

“Netizen semakin curiga, ada apa sebenarnya dengan TNBTS?” katanya. Dari informasi yang diterimanya, tanaman ganja yang ditemukan sudah mencapai tinggi 1,5 hingga 2 meter, siap panen. Beruntung, aparat hukum telah bertindak. Pengadilan Negeri Lumajang sudah menetapkan enam tersangka, dengan empat orang menjalani persidangan, satu orang meninggal, sementara otak dari operasi ini, Edi, masih buron.

“Edi menjanjikan imbalan Rp4 juta per kilogram ganja kepada para petani yang menanam. Ini bisnis besar,” ungkapnya. Khusnul berharap aparat hukum dapat menindaklanjuti kecurigaan publik dan memastikan tidak ada ‘No Viral, No Justice’ dalam kasus ini. “Kita tidak ingin hukum hanya berjalan karena viral. Harus ada kejelasan dari pihak berwenang!” tegasnya.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menantang 3.600 Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) untuk meningkatkan produktivitas padi di Jawa Timur hingga 12 juta ton per tahun pada 2025. Hal ini disampaikan Mentan dalam rapat koordinasi bersama PPL Jawa Timur di GOR Tri Dharma Petrokimia Gresik, Jumat (14/3) lalu. Menanggapi tantangan ini, Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Khusnul Khuluk, menegaskan bahwa petani membutuhkan dukungan nyata dari pemerintah pusat dan daerah agar target tersebut bisa tercapai. Menurut Khusnul, agar produksi padi di Jawa Timur dapat meningkat dari 9 juta ton lebih menjadi 12 juta ton, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah, khususnya Dinas Pertanian beserta jajaran di Pemprov Jatim.

“Salah satu faktor utama adalah infrastruktur pertanian. Saat ini, masih banyak desa yang memiliki jalan usaha tani yang belum terbangun dengan baik,” kata Anggota Fraksi PKS Jatim itu. Hal ini, katanya, menyebabkan biaya transportasi hasil panen, pupuk, dan kebutuhan pertanian lainnya menjadi mahal. Menurutnya, jika jalan usaha tani sudah layak dan bisa dilalui kendaraan besar, seperti mobil pengangkut, maka biaya operasional petani akan lebih rendah. Selain infrastruktur, modernisasi alat-alat pertanian juga menjadi faktor penting. Khusnul menekankan bahwa alat yang diberikan kepada petani harus disesuaikan dengan luas lahan.

**JATIM DITANTANG
PRODUKSI 12 JUTA
TON PADI,
KHUSNUL KHULUK:
PETANI BUTUH
DUKUNGAN
NYATA DARI
PEMERINTAH!**

“Jika lahannya kecil, penggunaan alat yang besar tidak akan efektif,” tegas legislator PKS asal Lumajang ini. Ia juga menyoroti pentingnya bimbingan bagi petani dalam penggunaan alat pertanian modern. Ia menilai, banyak alat pertanian yang disediakan pemerintah tidak dapat digunakan secara maksimal karena petani kesulitan mengoperasikannya. Selain itu, harga suku cadang yang mahal membuat petani enggan melakukan perbaikan jika alat mengalami kerusakan. Varietas padi unggul juga menjadi perhatian. “Pemerintah perlu segera mengembangkan benih yang tahan hama dan mampu menghasilkan panen dalam jumlah besar,” ujarnya. Jika petani menanam varietas unggul yang terbukti menghasilkan panen melimpah, mereka akan lebih termotivasi.

“Apalagi Pak Presiden menyatakan harga padi di penggilingan nanti Rp6.500 per kilogram. Kalau benar demikian, pasti petani senang menanam. Tapi kalau mereka tidak mendapatkan hasil yang menguntungkan, mereka bisa mencari alternatif lain untuk bercocok tanam,” ujar Khusnul. Terkait rencana Mentan yang akan memberikan hadiah bagi PPL berprestasi, Khusnul menilai ini sebagai langkah positif yang dapat meningkatkan semangat PPL dalam membimbing petani. Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah menyiapkan lokasi pelatihan bagi petani, di mana mereka bisa melihat langsung cara bercocok tanam yang efektif. Jika ada contoh nyata, seperti penggunaan pupuk kimia dan organik yang menghasilkan panen berkualitas, maka petani akan lebih yakin untuk menerapkannya.

Namun, Khusnul juga menekankan bahwa subsidi pupuk masih sangat ditunggu oleh petani. Meskipun ada dorongan untuk beralih ke pupuk organik, banyak petani yang masih keberatan jika harus meninggalkan pupuk subsidi tanpa ada dukungan alternatif yang jelas. “Mindset petani kita masih mengandalkan pupuk subsidi. Jika mereka harus beralih ke pupuk organik tanpa ada solusi yang jelas, tentu mereka akan keberatan,” ujarnya. Dengan memperhatikan infrastruktur, modernisasi alat pertanian, penggunaan varietas unggul, serta insentif bagi PPL, Khusnul optimistis target produksi padi 12 juta ton di Jawa Timur bisa tercapai. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan ini harus didukung dengan implementasi nyata dan komitmen penuh dari pemerintah pusat dan daerah.

FRAKSI PKS JAWA TIMUR



Follow us



www.fraksipksjatim.id



[fraksipksjatim](https://www.facebook.com/fraksipksjatim)